

BAB V.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Posisi Perum Bulog sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan ketentuan peraturan Pemerintah (*buffer stock policy*) untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan beras, disebut sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik dalam stabilisasi harga beras. Tugas Pelayanan Publik Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga beras, yaitu program pengadaan, program Raskin dan program Cadangan Beras untuk Pemerintah (CBP). Program pengadaan adalah Perum Bulog Divre DIY melakukan pembelian beras petani sebanyak-banyaknya melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan harga yang sesuai dengan Harga Pembelian Pokok (HPP) Pemerintah. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) memperoleh 10 hingga 15 kilogram selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram *netto* di titik distribusi. Sedangkan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) digunakan untuk Operasi Pasar Murni, yaitu kegiatan menjual beras yang ada di Gudang Perum Bulog dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang terjangkau serta mengatasi keadaan pasca bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

Perum Bulog Divre DIY disebut organisasi formal atau birokrasi, karena memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi di Perum Bulog Divre DIY yang tercantum di dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-

248 / DS200 / 09 / 2009. Struktur organisasi Perum Bulog Divre DIY terdiri dari Kepala Divisi Regional (Kadivre), Bidang Pelayanan Publik, Bidang Administrasi dan Keuangan, Gudang serta Unit Pengolahan Gabah / Beras.

Bidang Pelayanan Publik terdiri dari: Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar (Gasar), Seksi Persediaan dan Perawatan, Seksi Penyaluran, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha. Interaksi antar Seksi di Bidang Pelayanan Publik membentuk jaringan formal karena terjalin dengan relatif stabil dan terintegrasi dengan baik, serta berdasarkan tugas dan fungsi. Jaringan formal Bidang Pelayanan Publik adalah saling mendukung dan saling ketergantungan informasi serta sumber daya manusia. Jaringan formal di dalam (internal) Bidang Pelayanan Publik berupa koordinasi informasi terkait informasi persediaan dan pengadaan gabah / beras. Sedangkan kerja sama sumber daya manusia antar Seksi di Bidang Pelayanan Publik adalah sebagai tim pelaksana lapangan / Satuan Petugas (Satgas) Perum Bulog Divre DIY untuk operasi khusus, yaitu Program Operasi Pasar Murni (OPM) dan Program Raskin.

Jaringan formal di luar (eksternal) Bidang Pelayanan Publik adalah dengan Dinas / Instansi Pemerintah terkait dan Mitra Kerja yang disebut *stakeholders*. Koordinasi informasi Bidang Pelayanan Publik dengan Mitra Kerja dilakukan terkait pengadaan gabah / beras, sedangkan dengan Dinas / Instansi Pemerintah terkait untuk analisa harga pasar dan statistika. Kerja sama sumber daya manusia Perum Bulog Divre DIY dengan *stakeholders* adalah sebagai tim pelaksana lapangan / Satuan Petugas (Satgas) Program Operasi Pasar Murni (OPM).

Jaringan formal Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre DIY yang terjadi secara internal dan eksternal organisasi terjalin untuk kepentingan pengadaan beras serta analisa harga pasar dan statistika. Dimana kedua aktivitas ini sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan jumlah dan harga beras. Oleh sebab itu, jaringan formal Bidang Pelayanan Publik memegang peran penting terkait stabilisasi harga beras, khususnya di Kota Yogyakarta.

Jaringan formal Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga pasar di Kota Yogyakarta memiliki kelemahan baik secara internal dan eksternal. Secara internal, yaitu terjadi jaringan ganda bagi karyawan yang dipilih menjadi anggota tim pelaksana lapangan / Satuan Petugas (Satgas) Perum Bulog Divre DIY. Sedangkan secara eksternal, yaitu adanya hubungan vertikal yang hierarkis dengan landasan kebijakan dalam jaringan formal di dalam Rapat Operasi Pasar Murni (OPM).

Pelaksana lapangan / Satuan Petugas (Satgas) Perum Bulog Divre DIY antara lain untuk operasi khusus, yaitu Program Operasi Pasar Murni (OPM) dan Program Raskin. Perum Bulog Divre DIY memilih anggota Tim Satgas OPM dari Karyawan semua Bidang kecuali Bidang Pengawasan dan Gudang, sehingga akan terjadi jaringan ganda bagi karyawan yang dipilih menjadi anggota tim. Hal ini akan mengurangi waktu kerja dan tenaga karyawan.

Koordinasi yang terjadi antara Bulog Divre DIY, Dinas / Instansi Pemerintah terkait dan Menteri Perdagangan di dalam rapat OPM adalah secara vertikal *top down*. Hal ini terlihat dari adanya “Notulen Rapat Dinas” dan “Surat Keputusan” serta berdasarkan Instruksi Presiden Instruksi Presiden Republik

Indonesia No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Dengan demikian kebijakan tersebut merupakan perekat yang menyatukan organisasi secara bersama ke dalam suatu sistem. Namun disisi lain menunjukkan hubungan vertikal yang hierarkis dengan landasan kebijakan. Hal ini menunjukkan posisi kekuasaan yang sentralistik dari Menteri Perdagangan.

B. Saran

Saran bagi Perum Bulog Divre DIY, antara lain: (1) bersikap lebih analitis terhadap masalah dan (2) memantapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Perum Bulog Divre DIY menganalisa akar permasalahan pada kasus Pengadaan, sehingga diketahui solusi yang tepat dalam mengatasinya secara jangka panjang. Perum Bulog Divre DIY menempatkan karyawan yang tepat sebagai anggota tim / Satgas, agar sistem kerja perusahaan tetap berjalan dengan baik.

Saran bagi *stakeholders*, yaitu: (1) mengembangkan kerja sama yang baik agar saling menguntungkan dan (2) mengoreksi / memperbaiki kebijakan pemerintah. Jaringan formal Dinas / Instansi Pemerintah terkait dalam Operasi Pasar, yaitu: Disperindagkop Kota Yogyakarta dan DIY, BKPP DIY Kota Yogyakarta dan DIY serta BPS Kota Yogyakarta dan DIY. Peran serta Dinas / Instansi Pemerintah terkait dapat memberikan kemudahan dalam pembagian waktu. Dinas / Instansi Pemerintah terkait menentukan jadwal bersama untuk berjualan beras Operasi Pasar. Sedangkan mitra kerja dapat memberikan jaminan pasokan dan informasi produksi. Kebijakan perberasan perlu menyesuaikan dengan kondisi

di daerah, oleh karena itu diperlukan perubahan pelayanan publik yaitu deregulasi. Kebijakan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural. Penentuan waktu pelaksanaan dan harga jual beras Operasi Pasar dapat disesuaikan dengan perkembangan harga beras di daerah yang telah mengalami kenaikan.

Saran bagi masyarakat, yaitu: (1) berpartisipasi aktif sebagai konsumen beras dan (2) memberikan kontrol pada kinerja *stakeholders*. Masyarakat selalu mengakses beras Perum Bulog baik beras Raskin maupun beras Operasi Pasar, sehingga harga beras di pasar cenderung stabil. Masyarakat melaporkan baik secara langsung maupun tidak langsung keluhan tentang ketidaksesuaian beras dan mekanisme penyalurannya, karena hal itu merupakan hak mereka sebagai penerima pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2009*.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media.
- Lawang, R. M. Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- , 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.

Koran

- Kompas. *Perum Bulog Versus Tengkulak*. Sabtu 21 Juli 2007.

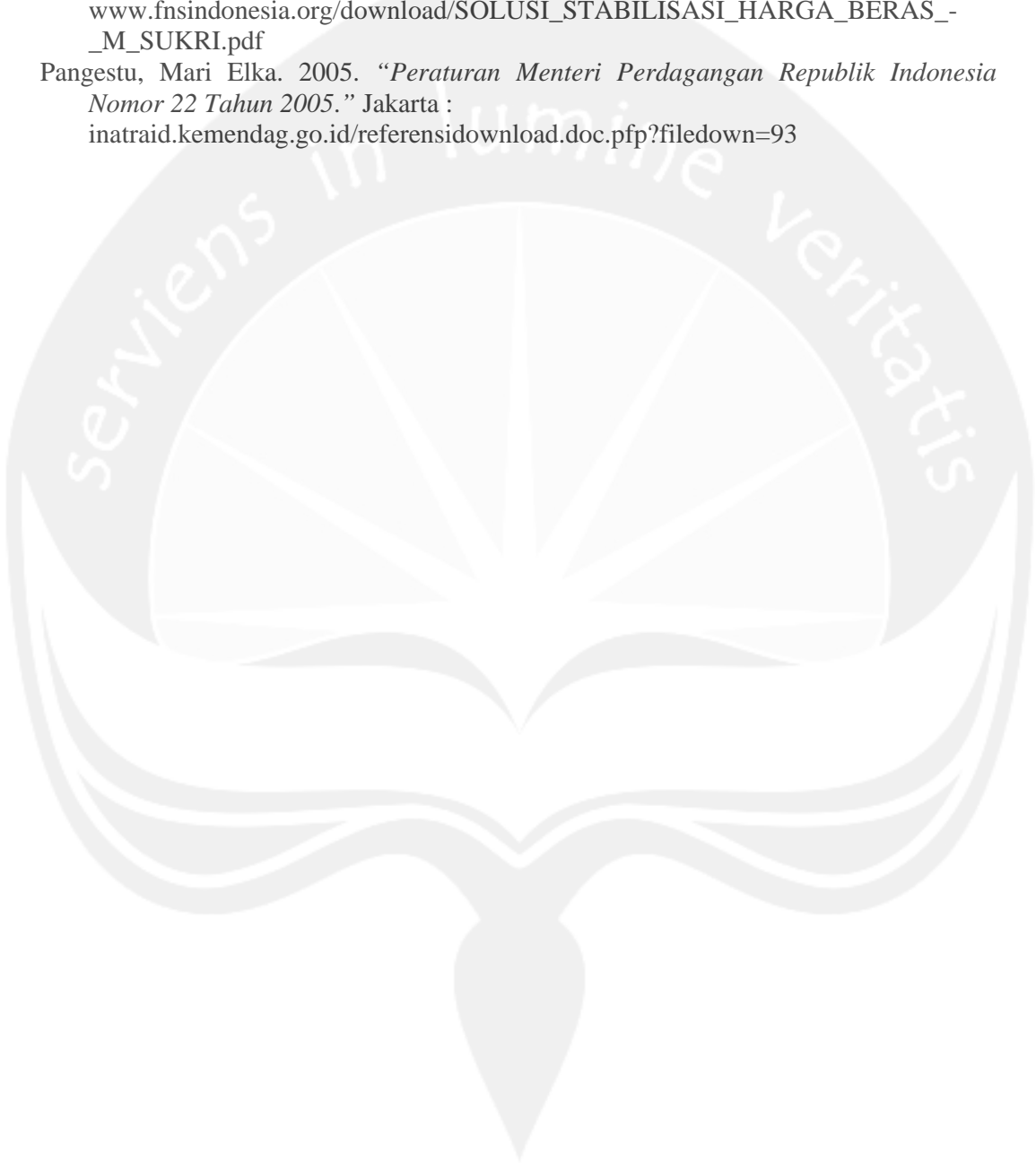
Dokumen

- Agenda Perum Bulog. 2006.
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. 2010. *Notulen Rapat Dinas*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta*.
- Brosur Perum Bulog. 2006
- Perum Bulog. 2010. *Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-248 / DS200 / 09 / 2009*. Jakarta.
- Perum Bulog Divre DIY. 2006. *Data Managerial Per Tanggal 2 September 2006*. Yogyakarta : Seksi Analisa Harga dan Pasar.
- Seksi Sumber Daya Manusia dan Hukum Perum Bulog Divre Daerah Istimewa Yogyakarta. 2011.
- Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Nomor B 216 / KMK / DEP.II / II / 2008 tanggal 5 Februari 2008.
- Ekasari, Yeni. 2007. *Laporan Internship : Pengolahan dan Pelaporan Data Perkembangan Harga dan Pasar Bidang Pelayanan Publik Seksi Analisa Harga dan Pasar pada Perum Bulog Divre Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.

Internet

- Saifullah, Agus. 2001. *"Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional"*, Jakarta: www.bulog.co.id.
- Direktur Utama Perum BULOG. 2010. *"Kebijakan Perberasan dan Stabilisasi Harga"*. Jakarta : www.bulog.co.id.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2009. *"Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009."* Jakarta : ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=inpres72009.pdf&type.

- Kusumawardhani, Astrida Dwi. 2008. "*Studi Implementasi Kebijakan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Barusari Semarang*". Semarang: eprints.undip.ac.id/13692/1/D2A06040111_ASTRID.pdf.
- Sukri, Mohamad. 2007. "*Solusi Stabilisasi Harga Beras*". Jakarta : www.fnsindonesia.org/download/SOLUSI_STABILISASI_HARGA_BERAS_-_M_SUKRI.pdf
- Pangestu, Mari Elka. 2005. "*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005.*" Jakarta : inatraid.kemendag.go.id/referensidownload.doc.pfp?filedown=93



LAMPIRAN



INTERVIEW GUIDE

Pertanyaan untuk Kepala Bidang Pelayanan Publik:

1. Apakah tugas utama Pelayanan Publik Perum Bulog Divre DIY?
2. Apakah yang dimaksud dengan operasi publik?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan operasi publik dan stabilisasi harga beras?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar:

1. Apakah yang dimaksud dengan stabilisasi harga beras?
2. Apakah penyebab kenaikan harga beras?
3. Bagaimana strategi Perum Bulog Divre DIY dalam stabilisasi harga beras?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM)?
5. Siapa saja *stakeholders* Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga beras?
6. Apakah tugas Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar?
7. Bagaimana mekanisme kegiatan pengamatan perkembangan harga dan pasar?
8. Apakah Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar sebagai penyusun *database* untuk operasi publik?
9. Bagaimana alur koordinasi terkait tugas stabilisasi harga beras di Perum Bulog Divre DIY?
10. Apakah terdapat masalah pada program pengadaan, program Raskin dan program Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Divre DIY?
11. Apakah studi kasus bagi Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga beras di Kota Yogyakarta?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Persediaan dan Perawatan:

1. Bagaimana penerimaan Raskin di Kota Yogyakarta?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Hukum:

1. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja Perum Bulog Divre DIY saat ini?
2. Bagaimana komposisi karyawan Perum Bulog Divre DIY saat ini?



TRANSKRIP WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Bidang Pelayanan Publik: Bapak Dedi Supriyadi, SH.

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2011 pukul 14.00-14.30 WIB:

1. Peneliti: “Apakah tugas utama Pelayanan Publik Perum Bulog Divre DIY?”
Jawaban: “Tugas utama Perum Bulog Divre DIY adalah operasi publik dan stabilisasi harga beras.”
2. Peneliti: “Apakah yang dimaksud dengan operasi publik?”
Jawaban: “Operasi publik adalah aktivitas atau operasional rutin Perum Bulog Divre DIY, yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyaluran beras.”
3. Peneliti: “Bagaimana mekanisme pelaksanaan operasi publik dan stabilisasi harga beras?”
Jawaban: “Pelaksana kegiatan operasi publik dan stabilisasi harga beras adalah Bidang Pelayanan Publik, khususnya Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar (Gasar) serta Seksi Penyaluran. Masing-masing Seksi di Bidang Pelayanan Publik memerlukan kerja sama di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.”

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar: Bapak Wahyu Widi Dinihari, S.TP.

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2011 pukul 14.30-15.00 WIB.

1. Peneliti: “Apakah yang dimaksud dengan stabilisasi harga beras?”
Jawaban: “Stabilisasi harga beras adalah menjaga agar harga beras tetap seimbang antara harga yang di terima petani dapat tetap menguntungkan dengan harga yang dibeli masyarakat dapat tetap terjangkau.”
2. Peneliti: “Apakah penyebab kenaikan harga beras?”
Jawaban: “Penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: produsen, konsumen dan Pemerintah. Karena petani sebagai produsen beras mengalami 2 (dua) masa pasang surut dalam menanam padi yaitu masa paceklik atau gagal panen dan panen raya. Sikap dan keputusan membeli oleh rumah tangga sebagai

konsumen beras ikut memberikan andil dalam kenaikan harga beras. Serta kebijakan umum atau keputusan Pemerintah yang sangat mempengaruhi kenaikan harga beras.”

3. Peneliti: “Bagaimana strategi Perum Bulog Divre DIY dalam stabilisasi harga beras?”

Jawaban: “Strategi dalam stabilisasi harga beras adalah menjaga kestabilan jumlah dan harga beras. Jawaban: “Strategi dalam stabilisasi harga beras yang digunakan Perum Bulog Divre DIY adalah sesuai dengan tugas Perum Bulog, yaitu: Program Pengadaan, Program Raskin dan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Program pengadaan adalah Perum Bulog Divre DIY melakukan pembelian beras petani sebanyak-banyaknya melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan harga yang sesuai dengan Harga Pembelian Pokok (HPP) Pemerintah. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) memperoleh 10 hingga 15 kilogram selama 10 bulan dengan harga Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram *netto* di titik distribusi. Sedangkan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) digunakan untuk Operasi Pasar Murni, yaitu kegiatan menjual beras yang ada di Gudang Perum Bulog dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang terjangkau serta mengatasi keadaan pasca bencana.”

4. Peneliti: “Bagaimana mekanisme pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM)?”

Jawaban: “OPM adalah kegiatan menjual beras yang ada di Gudang Perum Bulog dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang terjangkau. OPM merupakan permintaan dari Gubernur dan Kepala Daerah maka Perum Bulog Divre bekerja sama dengan *stakeholders* mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM). Pelaksanaan OPM menunggu Instruksi Gubernur melalui Disperindag Provinsi dan Kabupaten.”

5. Peneliti: “Siapa saja *stakeholders* Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga beras?”

Jawaban: “*Stakeholders* untuk pengadaan dan operasi pasar berbeda. *Stakeholders* pengadaan adalah penggilingan atau Mitra Kerja Perum Bulog Divre DIY yang terdiri dari 24 Usaha Dagang (UD) dan Gabungan Usaha Tani (Gapoktan) dari masing-masing Kabupaten dan Provinsi. Sedangkan *stakeholders* untuk operasi pasar adalah Dinas atau Instansi Pemerintah Kota dan Provinsi, antara lain: Dinas Pertanian (Distan), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS).”

Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2011 pukul 15.00-15.30 WIB:

6. Peneliti: “Apakah tugas Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar?”

Jawaban: “Sesuai deskripsi tata kerja, secara lebih lengkap tugas Seksi Pengadaan dan Gasar antara lain: merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan dan melaporkan kegiatan pengadaan yang meliputi perhitungan prakiraan jumlah dan biaya pengadaaan gabah / beras serta karung pembungkus, pelaksanaan pengadaan melalui Satuan Tugas (Satgas) atau kontraktor, penyiapan perjanjian atau kontrak, penyiapan dokumen tagihan, pengajuan dan pendistribusian serta pengecekan L / C pengadaan, serta pembinaan teknis. Serta mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan dan melaporkan kegiatan monitoring dan analisis serta pengamatan perkembangan harga dan pasar di tingkat produsen dan konsumen serta penyusunan data statistik seluruh komoditas untuk operasi publik. Sedangkan secara lebih singkat tugas Seksi Pengadaan dan Gasar adalah menjadi eksekutor atau pengambil keputusan terkait pengadaan beras dan analisa harga pasar dan statistika, misalnya dalam penerbitan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dan *Delivery Order* (DO), yaitu surat perintah penggunaan beras di Gudang Bulog untuk kepentingan Operasi Pasar atau keadaan darurat tertentu.”

7. Peneliti: “Bagaimana mekanisme kegiatan pengamatan perkembangan harga dan pasar?”

Jawaban: “Kegiatan pengamatan perkembangan harga dan pasar adalah melalui *survey* harga kepada pedagang sembilan bahan pokok (sembako) di 4 (empat) pasar tradisional di Kota Yogyakarta yaitu Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Demangan dan Pasar Lempuyangan. *Survey* dilakukan setiap 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, baik oleh karyawan Seksi Pengadaan dan Gasar maupun bersama Dinas atau Instansi Pemerintah terkait. Kemudian koordinasi melalui telepon dan atau bertemu langsung.”

8. Peneliti: “Apakah Seksi Pengadaan dan Analisa Harga dan Pasar sebagai penyusun *database* untuk operasi publik?”

Jawaban: “Iya. Seksi Pengadaan dan Gasar yang menyusun laporan “Data Managerial Harian”. Laporan ini berisi informasi tentang operasi publik Perum Bulog Divre DIY, yaitu perkembangan harga konsumen dan produsen, perkembangan pengadaan gabah atau beras, total persediaan beras, penyaluran RASKIN dan saldo RASKIN.”

9. Peneliti: “Bagaimana alur koordinasi terkait tugas stabilisasi harga beras di Perum Bulog Divre DIY?”

Jawaban: “Alur koordinasi terkait tugas stabilisasi harga beras di Perum Bulog Divre DIY adalah secara *top down* yaitu perintah dari Kepala Divre kepada Kepala Bidang Pelayanan Publik dan Kepala Bidang Pelayanan Publik meneruskannya kepada Seksi-Seksi yang membawahnya. Sedangkan tindakan stabilisasi harga beras yang biasanya disebut sebagai operasi pasar dilaksanakan oleh tim pelaksana lapangan atau Satuan Petugas (Satgas) Perum Bulog Divre DIY. Tim terdiri dari 4 kelompok dengan 3 orang di dalam tiap kelompoknya. Anggota tim berasal dari karyawan Perum Bulog semua Bidang kecuali Bidang Pengawasan dan Gudang.”

Wawancara pada tanggal 27 Februari 2012 pukul 15.00-15.30 WIB:

10. Peneliti: “Apakah terdapat masalah pada program pengadaan, program Raskin dan program Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Divre DIY?”

Jawaban: “Masalah Program Pengadaan adalah produksi menurun dan penawaran (*supply*) terbatas sehingga harga cenderung naik. Harga pasar lebih tinggi dari Harga Pokok Pemerintah (HPP), maka Perum Bulog membeli dengan tambahan / insentif harga. Selain itu cara lain yang di tempuh adalah dengan komersial yaitu dengan membeli sesuai harga pasar. Masalah program Raskin adalah stok beras Raskin. Stok beras Perum Bulog adalah secara nasional. Kekurangan stok di satu wilayah maka akan diambil dari wilayah lain, misalnya Perum Bulog Divre DIY mengambil dari Jawa Timur. Masalah CBP adalah Operasi Pasar. Dahulu Operasi Pasar dijual kepada pedagang di pasar tradisional, sehingga tidak tepat sasaran. Beras Operasi Pasar dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Sekarang Operasi Pasar sudah tepat sasaran. Beras Operasi Pasar langsung dijual kepada masyarakat. Operasi Pasar dilakukan di Kecamatan. Perum Bulog Divre DIY mengundang warga dan memberikan kupon dengan pembatasan jumlah pembelian maksimal 10 kilogram, 1 karung seberat 5 kilogram.”

11. Peneliti: “Apakah studi kasus bagi Perum Bulog Divre DIY terkait stabilisasi harga beras di Kota Yogyakarta?”

Jawaban: “Pengadaan adalah kasus utama yang dihadapi oleh Perum Bulog Divre DIY. Stok beras Perum Bulog Divre DIY harus selalu tersedia untuk kepentingan

Raskin dan Operasi Pasar, agar harga beras tetap stabil. Pada tahun 2011 produksi cenderung tetap atau bahkan menurun karena faktor eksternal, yaitu iklim yang dan serangan hama. Padahal jumlah penduduk diperkirakan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan harga beras semakin tinggi. Perum Bulog selama tahun 2011 telah empat kali mengadakan penyesuaian harga pembelian gabah dan pengadaan dalam negeri sesuai harga pasar, sehingga total penyerapan gabah dan beras di Divre DIY selama tahun 2011 mencapai 18.137 ton setara beras. Hal ini tidak menjadi solusi karena harga tetap sama. Kebutuhan beras Perum Bulog Divre DIY kemudian memakai beras impor.”

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Persediaan dan Perawatan: Ibu Majda Yulianingrum.

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2011 pukul 15.00-15.15 WIB:

1. Peneliti: “Bagaimana penerimaan Raskin di Kota Yogyakarta?”

Jawaban: “Jumlah penerima Raskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 11.783 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang tersebar di 45 Kelurahan.”

Pertanyaan untuk Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Hukum: Bapak Jurianto, S. AP.

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2011 pukul 15.15-15.30 WIB:

1. Peneliti: “Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja Perum Bulog Divre DIY saat ini?”

Jawaban: “Struktur organisasi dan tata kerja Perum Bulog saat ini berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-248 / DS200 / 09 / 2009.”

2. Peneliti: “Bagaimana komposisi karyawan Perum Bulog Divre DIY saat ini?”

Jawaban: “Komposisi karyawan Perum Bulog Divre DIY dapat anda tanyakan kepada Bu Wati karyawan Seksi SDM dan Hukum.”

Pertanyaan untuk Karyawan Seksi Sumber Daya Manusia dan Hukum: Ibu Suryawati Sri Utama, SH.

Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2011 pukul 15.30-15.45 WIB:

1. Peneliti: “Bagaimana komposisi karyawan Perum Bulog Divre DIY saat ini?”

Jawaban: “Perum Bulog Divre DIY memiliki pegawai sejumlah 62 orang dengan komposisi pegawai Tingkat Pendidikan Pegawai Perum Bulog Divre DIY. Pegawai Perum Bulog Divre DIY dapat dilihat di “Daftar Pegawai Perum Bulog Divre DIY per Agustus 2011.”